

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran menjadi salah satu masalah besar di setiap negara berkembang, termasuk di Indonesia. Pengangguran adalah kondisi dimana seseorang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran merupakan angkatan kerja dengan usia 15 tahun keatas dengan klasifikasi sebagai berikut (1) penduduk yang sedang mencari pekerjaan, (2) penduduk yang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab seperti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan sumber daya manusia, serta usia produktif yang tidak siap dalam menghadapi perkembangan teknologi dan rendah nya tingkat pendidikan.¹

Ketersediaan lapangan pekerjaan minim dengan sumber daya manusia yang besar adalah masalah yang sering ditemukan di negara berkembang yang akhirnya menyebabkan angka pengangguran menjadi tinggi. Bila dilihat dari sisi sosial, dampak dari angka pengangguran yang tinggi adalah dapat memicu terjadinya tindak kriminalitas. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, akan mudah terjerumus untuk melakukan tindakan apapun agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan melakukan perbuatan kriminal. Dalam sisi perekonomian negara, dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran adalah dapat menyebabkan minimnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi tidak stabil hingga berujung pada kemiskinan.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada Agustus 2022 jumlah pengangguran yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia

¹ Akramunnisa dan Fajriani. K-Means Clustering Analysis Pada Persebaran Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Varian*. April 2020. Volume 3, No 2, hlm:103–112.

mencapai 8,4 juta orang. Dari seluruh provinsi di Indonesia, DKI Jakarta memasuki 5 besar provinsi dengan jumlah pengangguran yang tidak sedikit. Data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik pada Agustus 2022 menunjukkan bahwa DKI Jakarta mencapai angka 7,18% untuk tingkat pengangguran. Posisi yang pertama adalah provinsi Jawa Barat dengan 8,31% , lalu Kepulauan Riau sebesar 8,23% disusul dengan Banten sebanyak 8,09% DKI Jakarta menduduki posisi keempat lalu Maluku di posisi kelima dengan jumlah 6,88%

Pemerintah tentu tidak diam saja melihat masalah yang ada. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka pengangguran agar tidak semakin melonjak tinggi demi terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera. Akan tetapi, perlu disadari pula untuk mewujudkan kondisi sejahtera tersebut membutuhkan proses yang panjang. Karena masalah pengangguran merupakan masalah yang tidak mudah. Oleh karena itu, masalah pengangguran menjadi fokus utama di beberapa negara untuk mencapai kesejahteraan. Jika penanganan masalah pengangguran tidak maksimal, maka akan berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan.²

Salah satu cara mengatasi pengangguran dapat melalui pemberdayaan. Pemberdayaan pada dasarnya membuat diri berdaya dan memiliki kemampuan. Pemberdayaan berasal dari kata daya yang memiliki arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*empowerment*”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan memiliki makna memberikan sebuah daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan.³

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan adalah lebih menekankan pada proses memperoleh dan memberikan ”daya” kekuatan atau kemampuan dan kemandirian agar dapat mengenali potensi diri yang dimiliki,

² Marlina Septi. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Akibat Pandemi Covid 19. *Jurnal Internasional Bahasa Inggris dan Sastra*. 2021, Volume 1, No 1 Hlm: 46–50.

³ Ir. Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), hlm. 2.

untuk menentukan kebutuhannya dan memilih alternatif pemecahan masalah terbaik yang dihadapinya secara mandiri dan berkelanjutan.

Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, salah satunya adalah dengan melakukan penguatan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam mendukung program pemberdayaan untuk membantu masyarakat agar terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera, pemerintah DKI Jakarta telah menghadirkan program Jakpreneur atau *Jakarta Entrepreneurship*. Jakpreneur adalah sebuah program fasilitasi yang dibuat oleh pemerintah kota Jakarta untuk mewadahi kegiatan kewirausahaan masyarakat. Jakpreneur merupakan salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta dengan dasar hukum Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyempurnaan program OK OCE yang dimulai pada tahun 2018 dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) tahun 2019. Pemprov DKI Jakarta menghadirkan Jakpreneur sebagai wadah untuk kreativitas, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan kewirausahaan.⁴

Sebagai program yang mewadahi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan kewirausahaannya, terdapat 7 perangkat daerah yang turut menyelenggarakan Program Jakpreneur yaitu Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi serta Dinas Sosial yang didampingi oleh para pendamping Jakpreneur. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi para pendamping program Jakpreneur ini memiliki tujuh konsep pembinaan yang dikenal dengan 7P yaitu; P1 (Pendaftaran), P2 (Pelatihan), P3 (Pendampingan), P4 (Perizinan), P5 (Pemasaran), P6

⁴ Anna Elisabeth Panjaitan. The Implementation of Jakarta Entrepreneurship (Jakpreneur) Program in Empowering Small and Medium Enterprises in Kembangan District Administrative City of West Jakarta. *Jurnal Administrasi Bisnis dalam Ekonomi dan Kewirausahaan*. April 2022, Volume 3, No 2, hlm: 28–36.

(Pelaporan Keuangan), P7 (Permodalan) yang tertuang di dalam Pergub No 2 Tahun 2020 Pasal 6.⁵

Agar program dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya pendampingan untuk masyarakat sebagaimana yang termasuk dalam salah satu 7 langkah pembinaan Jakpreneur yaitu pendampingan. Pendampingan adalah suatu interaksi yang dinamis antara masyarakat dengan pendamping sehingga terjalinnya sebuah kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini adalah keberhasilan program pemberdayaan. Kegiatan pendampingan menjadi suatu hal yang fundamental karena untuk mengantisipasi adanya kesalahpahaman yang terjadi antara pihak yang memberikan bantuan dengan penerima bantuan. Kesalahpahaman ini dapat disebabkan karena berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.⁶

Pendamping dapat disebut juga sebagai fasilitator atau agen perubahan yang memiliki idealisme dan motivasi yang tinggi untuk mengabdikan dalam pembangunan manusia dengan memberdayakan masyarakat. Pendamping memiliki ilmu dan keterampilan untuk diaplikasikan serta memiliki peran penting untuk memberikan semangat dukungan dan bantuan, inspirasi serta motivasi agar masyarakat mampu berkembang dan mandiri serta pada akhirnya mampu berdaya. Pendamping juga harus mampu menciptakan proses komunikasi dengan prinsip partisipatif, sehingga posisi pendamping tidak mendominasi tetapi juga mendengarkan aspirasi atau pendapat dari masyarakat.⁷

⁵ Junaidi Hendro and Shabrina Arlinda. Pengaruh Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jak Prenenur) Terhadap Omset Penjualan UMKM Di Masa Pandemi Covid 19 Di Wilayah Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. *Jurnal STEI Ekonomi*. 2020, Volume 29, No 2, hlm: 31–43.

⁶ Sucianty Ramadhanty dkk. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Pembuatan Masker Kain Flanel Di Pondok Pinang Jakarta Selatan. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. 2020, hlm: 1–8.

⁷ Bambang Suswanto dkk. Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Suderman*. 2020, hlm: 40–60.

Pendampingan program Jakpreneur memiliki beberapa poin fokus untuk membantu masyarakat. Melansir dari laman website resmi Jakpreneur, terdapat 7 poin fokus pembinaan seorang pendamping kepada masyarakat yaitu pemasaran, pemodalannya, laporan keuangan, memberikan ide kreatif, melakukan pola pikir perubahan kewirausahaan, membantu menyelesaikan masalah kewirausahaan, dan membentuk pelaku usaha yang unggul. Sehingga dalam pendampingannya, masyarakat benar-benar dibimbing untuk mampu mengembangkan usahanya dan melakukan inovasi untuk dapat memajukan usaha yang mereka tekuni.

Kecamatan Kramat Jati merupakan salah satu dari 44 kecamatan di DKI Jakarta yang juga menjadi tempat penyelenggaraan Program Jakpreneur. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Kramat Jati merupakan pelaku usaha dan dengan adanya Program Jakpreneur ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih terampil dan mampu meningkatkan taraf kehidupannya. Namun dalam penyelenggaraannya, terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Masalah tersebut yaitu ditemukan beberapa binaan kurang aktif untuk mengikuti kegiatan program karena tidak percaya diri pada produk yang dimiliki dan memiliki kepedulian rendah. Lalu permasalahan berikutnya, binaan kurang memahami mengenai inovasi produk untuk menarik konsumen.

Masalah di atas berkaitan dengan pendampingan peserta binaan sebagaimana yang telah terdapat di 7 fokus poin pendampingan yaitu pemberian motivasi dan pola pikir kewirausahaan dan pemberian ide kreatif serta inovatif. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian yaitu ‘PERAN PENDAMPING PROGRAM JAKPRENEUR DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KRAMAT JATI’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana kegiatan pendampingan program Jakpreneur di Kecamatan Kramat Jati?
- b. Bagaimana peran pendamping program Jakpreneur dalam pemberdayaan

masyarakat di Kecamatan Kramat Jati?

C. Tujuan

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, adalah untuk mendeskripsikan:

- a. Kegiatan pendampingan program Jakpreneur di Kecamatan Kramat Jati
- b. Peran pendamping program Jakpreneur dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kramat Jati

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian ilmu dan menjadi referensi terkait program Jakpreneur dan pemberdayaan masyarakat
- b. Sebagai bahan acuan dan referensi dalam melakukan penelitian peran pendampingan dan pemberdayaan masyarakat

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas kajian ilmu pengetahuan khususnya mengenai program Jakpreneur

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di Universitas Negeri Jakarta khususnya bagi Jurusan Pendidikan Masyarakat